

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pelaporan Anti Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius diseluruh dunia. Menurut *Corruption Perception Indeks* (CPI) tahun 2018 yang diambil dari *Transparency International* (2018) Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara dengan dengan nilai 38. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang masih tinggi. Untuk mengurangi tingkat korupsi, dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Pemerintah telah membuat banyak upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan banyak peraturan. Tiga lembaga terkemuka di Indonesia yang menggalakkan program anti korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang lainnya berkomitmen untuk melawan korupsi dan penyuapan. Beberapa inisiatif hukum telah ditetapkan untuk mempromosikan program-program anti korupsi, sebagai berikut:

1. UU No. 8 tahun 2010 fokus pada pencegahan dan pemberantasan aktivitas kejahatan pencucian uang.
2. UU No. 46 tahun 2009 yang fokus pada pengadilan aktivitas korupsi.
3. UU No. 30 tahun 2002 yang berisi Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. UU NO. 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara

5. UU No. 7 tahun 2006 yang berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

6. UU No. 20 tahun 2001 yang berisi amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 (Pemberantasan Kejahatan Aktifitas Korupsi)

Selain membuat undang-undang, langkah legal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari pencegahan korupsi yaitu sebagai berikut ini:

1. *National Guidance of Good Corporate Governance*, dikeluarkan oleh komite nasional *governance policy* pada tahun 2006.

2. *Capital Market Supervisory Board* melalui surat edarannya No. SE-03/PM/2000 direkomendasikan untuk perusahaan publik agar melakukan komite audit.

3. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang berisi implementasi implementasi kode *corporate governance* untuk bank umum.

4. Kebijakan tata kelola BUMN, termasuk surat edaran dari menteri BUMN No. 106 tahun 2000 dan dekrit Kementrian BUMN No. 23 tahun 2000. Sebagai tambahan, pemerintah juga mengeluarkan dekrit Kementrian BUMN No. 103 tahun 2002 yang berisi stabilisasi komite audit.

5. Roadmap tata kelola pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2003.

6. Strategi nasional untuk mencegah korupsi dalam aturan medium (2012-2014) dan jangka panjang (2012-2025) mengenai strategi pencegahan.

strategi pelaksanaan undang-undang, strategi harmonisasi regulasi, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan asset, strategi edukasi anti korupsi dan budaya, dan strategi mekanisme pelaporan anti korupsi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi digunakan sebagai acuan dan ide dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2017) mengenai “Organisasi nirlaba dan praktik pengungkapan anti korupsi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi enggan untuk mengungkapkan catatan korupsi mereka, dan kebijakan serta prosedur anti-korupsi yang ada untuk menjaga transparansi dan tata kelola yang baik. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut mungkin disebabkan oleh tidak adanya peraturan wajib pengungkapan anti korupsi, organisasi-organisasi Australia akan tetap enggan untuk mempublikasikan rincian langkah-langkah anti korupsi yang mereka miliki. Sampel terdiri dari 20 anggota terbesar (berdasarkan pendapatan) dari 94 anggota ACFID tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan Joseph et al. (2016) mengenai “Perbandingan penelitian praktik pengungkapan anti korupsi pada aktivitas *corporate social responsibility* perusahaan-perusahaan di Malaysia dan Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mengungkapkan lebih banyak informasi pengungkapan anti korupsi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Malaysia. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh tingginya tekanan untuk mengungkapkan informasi anti korupsi di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Data di input berdasarkan observasi laporan

tahunan dari beberapa organisasi, laporan keberlanjutan, literatur sebelumnya dan indikator Global Reporting Initiative (GRI). Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 34 perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) dan 24 perusahaan Malaysia yang berpartisipasi dalam ACCA Malaysia Sustainability Report (MaSRA).

Penelitian yang dilakukan Islam, Haque, Dissanayake, Leung, dan Handley (2015) mengenai “Pengungkapan perusahaan dalam kaitannya dengan memerangi suap perusahaan: studi kasus dua perusahaan telekomunikasi Tiongkok”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tiongkok menunjukkan tren peningkatan dalam pengungkapan upaya mereka untuk memerangi penyuapan. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh perhatian media global mengenai praktik penyuapan di industri telekomunikasi Tiongkok. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua perusahaan telekomunikasi di Tiongkok yaitu China Mobile dan ZTE Corporation.

Penelitian yang dilakukan D'onza et al. (2017) mengenai “Pengungkapan tentang langkah-langkah untuk mencegah resiko korupsi: sebuah studi pemerintah daerah Italia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan langkah-langkah anti korupsi secara positif terkait dengan persentase direktur eksternal dalam suatu badan pemerintah daerah. Peneliti berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh pandangan bahwa pengungkapan adalah sarana yang oleh para direktur dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan mereka bahwa mereka bertindak secara optimal. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pemerintah daerah Italia.

Rangkuman penelitian terdahulu mengenai pelaporan anti korupsi dapat dilihat pada Tabel 2.1:



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Teori	Sumber Data	Sampel	Variabel	Hasil
1.	Halter, de Arruda, dan Halter (2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara perwakilan perusahaan</li> <li>• Wawancara dengan suplier</li> </ul>	Perusahaan multinasional yang ada di Brazil dengan jumlah karyawan 40.000 diseluruh dunia.	<u>Dependen:</u> Korupsi  <u>Independen:</u> Transparansi	Salah satu inisiatif mengurangi korupsi paling penting dapat dengan jelas diberikan oleh transparansi informasi dan komunikasi kode etik dalam organisasi.
2.	Hess (2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keberlanjutan</li> <li>• Pelaporan anti korupsi</li> </ul>	Perusahaan sektor privat	Dependen: Korupsi  Independen: Prinsip perusahaan	Sektor publik perlu mengeksplorasi cara-cara itu dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi prinsip-prinsip perusahaan untuk benar-benar mengatalisasi komitmen perusahaan untuk memerangi korupsi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

3.	Barkemeyer, Preuss, dan Lee (2015)	Teori Institutional	Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan	Tujuh sektor perusahaan (perbankan; konstruksi; listrik; logam industri; pertambangan; minyak & gas dan akhirnya gas, air & multi-utilitas) yang menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan pada tahun 2006-2009.	<p>Dependen: Indikator GRI SO2, SO3, dan SO4</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan tingkat negara dan tingkat regional</li> <li>• Tekanan tingkat sektoral</li> <li>• Tekanan global</li> </ul>	Perusahaan-perusahaan Asia Selatan dan Timur ternyata memiliki tingkat cakupan indikator GRI yang tinggi tentang korupsi, sedangkan negara-negara Eropa Timur menunjukkan tingkat yang sangat rendah
4.	Blanc, Branco, dan Patten (2016)	Tidak disebutkan.	laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi	Perusahaan Amerika yang ada di Transparency International dan menerbitkan laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi.	<p>Dependen: Pengungkapan Anti-Korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paparan Media</li> <li>• Kebebasan per</li> </ul>	Reaksi pasar rata-rata terhadap rilis laporan TI pertama adalah negatif dan signifikan secara statistik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

5.	Healy dan Serafeim (2016)	Tidak disebutkan.	Pengungkapan antikorupsi perusahaan berasal dari Transparency International (TI)	500 perusahaan terkemuka dari Forbes Maret 2007 Global 2000, termasuk 250 perusahaan terbesar yang terdaftar, 107 perusahaan dari sektor berisiko tinggi, dan 143 perusahaan dari 25 negara pengeksport global teratas.	<p>Dependen:</p> <p>Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peringkat Anti korupsi perusahaan</p> <p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance</i></p>	<p>Perkiraan korupsi di negara asal positif menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara asal yang kurang korup memiliki peringkat lebih tinggi.</p> <p>Peningkatan persentase direktur independen berkaitan dengan peningkatan peringkat antikorupsi.</p>
6.	Blanc, Islam, Patten, dan Branco (2017)	Tidak disebutkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dow Jones Factiva database.</li> </ul>	Peringkat Transparency International tahun 2012 tentang pengungkapan anti korupsi oleh 105 perusahaan multinasional terbesar di dunia	<p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paparan media</li> <li>Kebebasan press</li> </ul>	<p>Paparan media secara positif terkait dengan perbedaan dalam pengungkapan anti-korupsi perusahaan sampel.</p> <p>Pengungkapan kurang luas di mana kebebasan pers negara asal lebih dibatasi dan berkurangnya kebebasan pers tampaknya mengurangi dampak paparan media terhadap pengungkapan tersebut.</p>



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan

7.	Gunawan & Joseph (2017)	<i>Coercive isomorphism</i>	Forum group interview 10 perusahaan dengan praktik CSR terbaik	10 perusahaan dinominasikan dalam Indonesia CSR Award 2014	<p>Dependen: Praktik anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan berdasarkan industri</li> <li>• Perusahaan berdasarkan kepemilikan</li> </ul>	Praktik ACP di perusahaan praktik berbasis CSR di Indonesia berlaku untuk aktivitas bisnis umum dan tidak khusus untuk aktivitas CSR, seperti amal, sponsor, donasi, dan keterlibatan masyarakat.
8.	Islam, Dissanayake, Dellaportas, dan Haque (2018)	Teori Legitimasi  Teori <i>Media-agenda setting</i>	Laporan keberlanjutan Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	<p>Dependen: Pengungkapan <i>anti-bribery</i></p> <p>Independen: Perhatian media terhadap perusahaan</p>	Pengungkapannya secara signifikan terkait dengan perhatian media.

T

9.	Issa dan Alleyne (2018)	Teori Institusional	Laporan keberlanjutan 66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	66 perusahaan Gulf Council Council (GCC) tahun 2014.	Dependen: Praktik pengungkapan anti korupsi  Independen: <i>Good Corporate Governance</i>	Peningkatan signifikan dalam pentingnya pelaporan anti-korupsi sebagai cara mengurangi korupsi, secara global.
----	-------------------------	---------------------	--	--	---	--

### 2.3 Teori Coercive Isomorphism

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Joseph (2017) skripsi ini mengadopsi *coercive isomorphism* sebagai kerangka teoritis yang melandasi pengembangan hipotesis yang diuji. *Isomorphism* merupakan satu dimensi dari teori institusional yang menjelaskan bahwa, dalam konteks pengungkapan informasi, suatu organisasi mendapatkan tekanan institusional untuk mengungkapkan informasi sehingga organisasi tersebut melakukan berusaha melakukan adaptasi untuk merespon tekanan tersebut (Dimaggio dan Powell, 1983). Salah satu sumber tekanan ini bisa berasal dari *stakeholder*<sup>2</sup> kunci. Tekanan semacam ini disebut *coercive isomorphism* (Dimaggio dan Powell, 1983). *Coercive isomorphism* merupakan hasil dari tekanan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang diberikan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain atau individu dimana organisasi tersebut sangat bergantung kepada pihak-pihak tersebut (Dimaggio dan Powell, 1983). Contoh dari tekanan formal adalah aturan-aturan yang tertulis, seperti UU. Sedangkan contoh dari tekanan informal adalah aturan-aturan yang tidak tertulis.

Tekanan baik tersebut bisa bersifat persuasif, paksaan dan kolusi. Pada *coercive isomorphism*, kekuatan stakeholder memegang peran penting yang memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik kelembagaan tertentu (misalnya pengungkapan CSR) supaya terlihat sama dengan perusahaan lain yang

---

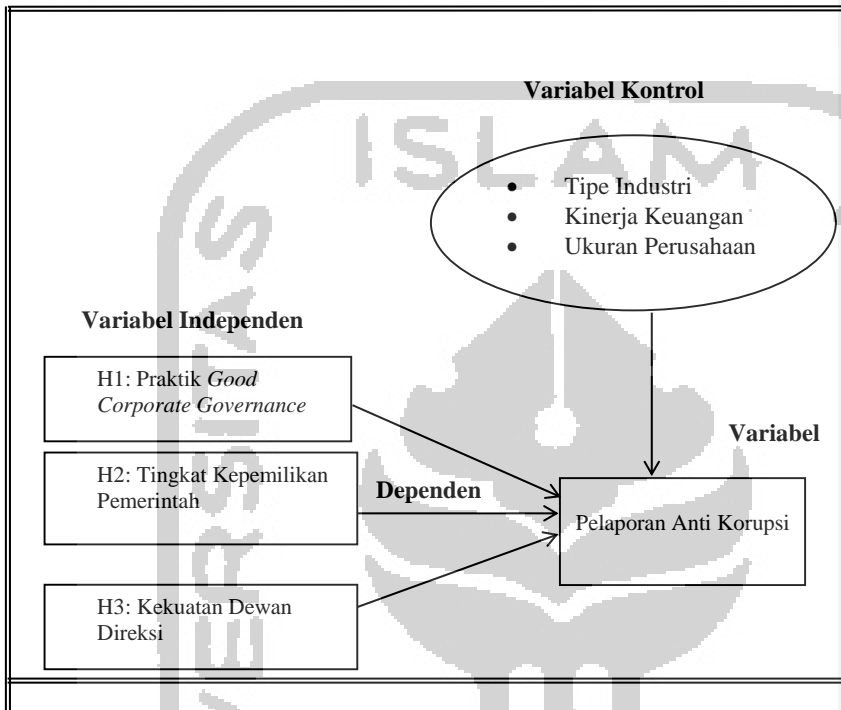
<sup>2</sup> Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu apa pun yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh aktivitas dan/atau kebijakan organisasi, seperti kreditur, karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah.

beroperasi di lingkungan institusi yang sama. Tekanan yang bersifat koersif berasal dari berbagai sumber seperti peraturan hukum dan aturan politik masyarakat luas.

#### 2.4 Skema konseptual

Skripsi ini menguji pengaruh tiga variabel independen, yaitu praktik *good corporate governance*, tingkat kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi, terhadap tingkat pelaporan anti korupsi di dalam kerangka teori *coercive isomorphism*. Selain itu, skripsi ini juga mengadopsi tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Skema konseptual yang menggambarkan seluruh set variabel independen, kontrol, dan dependen dalam skripsi ini disajikan dalam Gambar 2.1.





Gambar 2.1 Skema Konseptual

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Praktik *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik akan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Investor lebih percaya terhadap perusahaan yang memiliki praktik *good corporate governance* yang baik dibandingkan dengan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki praktik *good corporate governance* yang buruk (Arifin, 2003).

Dalam teori *coercive isomorphism* bahwa perusahaan akan mendapatkan tekanan dari stakeholder yang terefleksikan dalam indikator *corporate governance score*. Ketika perusahaan mendapatkan tekanan maka tekanan tersebut akan membuat perusahaan melaporkan pengungkapan anti korupsi. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Jayanti (2016) menunjukkan hubungan yang positif bahwa GCG mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Healy dan Serafeim (2016) bahwa praktik *good corporate governance* berkaitan dengan peningkatan peringkat anti korupsi. Penelitian Bernardi dan Threadgill (2011) juga menunjukkan bahwa praktik *good corporate governance* menunjukkan hubungan yang positif terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena GCG berpengaruh terhadap CSR, Peneliti beranggapan bahwa GCG juga akan berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H1: Praktik *good corporate governance* memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pelaporan anti korupsi.

### **2.5.2 Tingkat Kepemilikan Pemerintah**

Tingkat Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam teori *coercive isomorphism* tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu, termasuk praktik pengungkapan anti korupsi. Melalui kepemilikan ini, pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan agar sesuai dengan

kepentingan pemerintah untuk melaporkan pelaporan , termasuk pelaporan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) menunjukkan hubungan positif dan signifikan kepemilikan pemerintah dengan tingkat pelaporan sosial di Malaysia. Cahaya et al. (2012) juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah yang berkaitan dengan buruh dalam hubungan yang positif. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H2 : Tingkat kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pelaporan anti korupsi.

### **2.5.3 Kekuatan Dewan Direksi**

Kekuatan dewan direksi yang direfleksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap pelaporan anti korupsi perusahaan. Dalam teori *coercive isomorphism* ketika semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh direksi maka dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yang mereka ambil, hal ini menyebabkan tekanan terhadap direksi untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh La (2019) menyatakan bahwa kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja CSR. Oleh karena kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja CSR, Penulis beranggapan bahwa kekuatan dewan direksi juga akan berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.

Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas dan penelitian sebelumnya, skripsi ini memprediksikan hipotesis berikut ini:

H3 : Kekuatan dewan direksi memiliki hubungan yang positif terhadap pelaporan anti korupsi

#### **2.5.4 Variabel Kontrol**

Skripsi ini juga menguji tipe industri, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan, sebagai variabel kontrol untuk diuji dalam analisis statistik. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka perusahaan akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang besar dapat mengungkapkan lebih banyak informasi sosial karena mereka berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan (Cahaya, Porter, dan Brown, 2008). Industri yang mempunyai tipe industri yang berbeda menghadapi risiko korupsi berbeda dalam operasinya. Perusahaan dari beberapa industri lebih mungkin untuk berinteraksi dengan pemerintah yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa atau negosiasi lainnya, dan karenanya, menghadapi risiko korupsi yang lebih besar (Healy dan Serafeim, 2016).